



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARRIEF CHANDRA SETIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **858604**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah Seluas 5.981 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 5.253 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **513.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT2,4L DAKAR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ST WAGON 100 Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, HONDA CBR 250 RB Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **190.845.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	93.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.796.945.000
III. HUTANG	Rp.	640.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.156.945.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.